

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Bohari, H. 1992, *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*". PT. Remaja Rosda Karya. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Moleong, J. Lexy, 2007. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Oentoro, D. SE., MM. 2010. *Manajemen Pemasaran Modern*.
- Pandiangan, L, 2008. *Modernisasi & reformasi pelayanan perpajakan: berdasarkan UU terbaru*. Elex Media Komputindo.
- Pandiangan, L 2013. *Cara Menghindari 37 Larangan Perpajakan*. Elex Media Komputindo.
- Salim dan Sutrisno. 2014. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Manullang, 2012. *Manajemen strategi*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Hubeis, Musa dan Mukhamad Najib. 2014 *Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Wijatno, S. 2014. *Perdagangan bebas dalam perspektif hukum perdagangan internasional*. Grasindo.

Sari, Dian. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Adimata.

Kotler, Philip dan Keller Kevin. 2009. *Manajemen Pemasaran*, Edisi tiga belas jilid dua. Jakarta: Penerbit indeks.

Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Suryanto, M. H., & SE, M. 2016. *Sistem Operasional Manajemen Distribusi*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Pardede, P. M. 2011. *Manajemen strategik dan kebijakan perusahaan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

#### **Artikel Jurnal Ilmiah dan Skripsi**

Sri Perti Andini. 2018. *Free Trade (FTZ) Tanjungpinang Dalam Kerangka Ekonomi Politik Kelembagaan*.

Pax Nobiscum Siregar. 2017. *Strategi Repositioning Perilaku SDM Badan Pengusaha Kawasan Bintan Wilayah Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Investasi Di Kota Tanjungpinang*.

Prabowo Siswanto. 2011. *Analisi Dampak Perdagangan Bebas Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah (Studi Kasus: Provinsi Jawa Tengah)*

Lay Rade, Yenny, 2014. *Evaluasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang*.

IY Prastya, K Kustiawan. 2015. *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Free Trade Zone (FTZ) di Kawasan Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau*.

- Tina Murti Agustina. 2010. *Analisis Strategi Pemasaran Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam Dalam Menarik Investasi Asing*
- Yanti, Nofri, 2014. *Dinamika Pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Batam.*
- Hardiansyah, R. 2016. *Analisis Implementasi Kebijakan Pulau Bintan Sebagai Free Trade Zone (FTZ) Terhadap Investasi di Bintan. Jurnal Benefita , 1 (3), 163-176.*
- Handrisal, Adhayanto, O., & Audina, A. 2021. *Pengawasan Peredaran Rokok Khusus Kawasan Bebas Di Kota Tanjungpinang. 6, 191–210.*
- Jeklin, A. 2016. *Free Trade (FTZ) Tanjungpinang Dalam Kerangka Ekonomi Politik Kelembagaan, 1–23.*
- Pandiangan, L. 2002. *Urgensi Pemotongan dan Pemungutan Pajak dalam Sistem Perpajakan Nasional. Vol 2 No. Jurnal Perpajakan Indonesia.*
- Chairani. 2021. *Pemko Tanjungpinang Apresiasi Bea Cukai Berhasil Tangkap Barang Ilegal Senilai Miliaran. Diperoleh dari <https://www.tanjungpinangkota.go.id/berita/pemko-tanjungpinang-apresiasi-bea-cukai-berhasil-tangkap-barang-ilegal-senilai-miliaran>.*
- Kumalasari, N. R. 2020. *Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Produk Di Toko Ismart Dan Indomaret Ponorogo diperoleh dari (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).*
- Adi Suryadi, Fachran, 2016, *Kerjasama Indonesia dan Singapura Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Ekonomi Khusus*

Puteri, F. S. 2019. *Matriks Boston Consulting Group (BCG) sebagai dasar Perencanaan Strategi Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Matahari Department Store Tbk)*. Diperoleh dari JIAGABI (Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis), 8(3), 130-135.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No 4 Tahun 1970 Tentang “Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Undang-Undang No.10 Tahun 1985 tentang “Pencabutan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang”.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (*FREE TRADE ZONE/FTZ*) menetapkan penyatuan tiga kawasan perdagangan bebas yaitu Batam,Bintan ,Karimun dan Tanjungpinang menjadi satu kesatuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang penetapan wilayah Bintan Kota Tanjungpinang sebagai wilayah FTZ.

Peraturan Daerah No.10 Tahun 2014 Tentang rencana tata ruang wilayah kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 sebagai landasan kebijakan penyelenggaraan Kegiatan Free Tred Zone wilayah Tanjungpinang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 34 /PMK.04/2021 Tentang Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 PMK.04/2017 Tentang tata laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Bebas Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintang.

### **Website**

Peta wilayah ftz. (2021) diperoleh dari <https://ftzkepri.net/kawasan>

Pengajuan perizinan investasi di kawasan FTZ diperoleh <https://oss.go.id/>  
<https://wartarakyat.co.id/2019/09/15/akhirnya-bea-cukai-amankan-rokok-tanpa-pita-cukai-di-pasar-baru-tanjungpinang/html>.

